

ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN DI BAWAH PEMERINTAHAN JEPANG DI KOTA MEDAN (1942-1945)

Sahat Marito Simanullang, Reka Seprina

Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi sahatmaritosimanullang@gmail.com,

reka.seprina@unja.ac.id

Abstract (English)

This research was conducted to find out the background of the development of the education system under Japanese rule in the city of Medan (1942-1945), the philosophical foundations of education in the city of Medan during the Japanese occupation and educational policies in the city of Medan during the Japanese occupation (1942-1945). Heuristics (gathering sources), source criticism, interpretation (interpretation) and historiography (writing history) are the methods used in this study (writing history). Based on research findings, the education provided in the city of Medan during the Japanese empire was semi-military education which included physical training for children, adults, and strict medicalization. However, most of Medan's population experiences difficulties in education. Education held during the Dutch period at that time was very different from education organized by the Japanese government in Medan because every native member was given permission to access it. The Japanese Education for Medan City however was only intended as propaganda, because after implementing the actual policy, the number of outstanding students decreased and the number of schools also decreased sharply.

Article History

Submitted: 20 September 2023

Accepted: 29 September 2023

Published: 30 September 2023

Key Words

Education, Military
Education.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana latar belakang berkembang sistem Pendidikan di Bawah Pemerintahan Jepang di kota Medan (1942-1945), landasan filsafat pendidikan di kota Medan pada masa pendudukan Jepang dan kebijakan pendidikan di kota Medan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan sejarah) adalah metode yang digunakan dalam kajian (penulisan sejarah) ini. Berdasarkan temuan penelitian, pendidikan yang diberikan di kota Medan pada masa kekaisaran Jepang adalah pendidikan semi militer yang meliputi pembinaan jasmani untuk anak-anak, orang dewasa, dan indokterasi ketat. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk Medan mengalami kesulitan dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda pada saat itu sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang di Medan karena setiap anggota pribumi diberikan izin untuk mengaksesnya. Pendidikan Jepang untuk Kota Medan, bagaimanapun hanya dimaksudkan sebagai propaganda, karena setelah menerapkan kebijakan yang sebenarnya, jumlah siswa yang bersekolah menurun dan jumlah sekolah juga menurun tajam.

Sejarah Artikel

Submitted: 20 September 2023

Accepted: 29 September 2023

Published: 30 September 2023

Kata Kunci

Pendidikan, Pendidikan
Militer.

Pendahuluan

Setelah melepas tenggeran, Jepang segera mulai menaikkan balatantara ke sisi dekat pimpinan Jenderal Terauchi untuk mengumpulkan HongKong, Buma, Malaya, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Ekspor Jepang pertama yang direkomendasikan untuk mengeksplor Indonesia adalah tentara ke-7, yang meliputi Sumatera. Tahun 1942 merupakan awal dari Invasi

Belanda ke Sumatera, dan pada saat itu, Jepang menguasai sejumlah provinsi, termasuk Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan terutama Medan di Sumatera. Awal kedatangan Jepang ke kota Medan berawal dari keinginan untuk mendirikan pangkalan militer, namun di samping itu pemerintah Jepang juga ingin menyebarluaskan pendidikan di kota Medan khususnya Pendidikan Militer.

Dalam catatan sejarah, Jepang pertama kali mendarat di sebuah muara di lepas pantai Labuhan Ruku pada 12 Maret 1942. Pendaratan mereka tidak seperti yang diharapkan karena lumpur. Mendarat Jepang kedua di Pelabuhan Tanjung Tiram, Batu Bara, belakangan. Pasukan Jepang selanjutnya melakukan perjalanan ke desa yang berdekatan, yaitu Desa Parupuk. Orang-orang menyambut mereka dengan gembira dan berharap daerah mereka akan dibebaskan dari penjajahan Belanda menyambut ketika melihat kedatangan Jepang. Masyarakat Jepang memutuskan di beberapa kota besar di Sumatera Timur dengan mobil dan sepeda yang mereka bawa, serta kendaraan yang mereka pinjamkan. Setelah masuknya Pemerintahan Jepang di Kota Medan, kemudian membuat kebijakan terhadap Pendidikan yaitu para pelajar di Kota Medan wajib mempelajari Bahasa Jepang. Sebelum melanjutkan studi, siswa harus belajar tentang sejarah Jepang, lagu kebangsaan Kimigayo, dan geografi. Dan Bahasa Indonesia kini diwajibkan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah, menggantikan Bahasa Belanda.

Kebijakan pendidikan Jepang berpusat pada menciptakan sekolah- sekolah. Pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan dasar dibakukan menjadi satu gaya. tentu saja, sekolah rakyat 6 tahun (*kokumin gakko*), diikuti oleh (*Shoto Chu Gakko*) SMP 3 tahun, dan sekolah (*Kogyo Semmon Gakko*) setelah SMP 3 tahun. Kemudian etiket militer diciptakan yang merupakan ciri khas serta pemerintah Jepang mencurahkan sumber daya untuk pendidikan. Siswa dipaksa mengabdikan diri untuk *kinrohosi* (kebaktian keagamaan), misalnya mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, meningkatkan produksi pangan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan. Selain itu, pelatihan fisik dan militer yang keras juga dilakukan. Siswa diajarkan dengan cara yang mendekati "karakter Jepang" (*Nippon Seishin*). Persyaratan lain untuk siswa termasuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo* dan lagu-lagu lainnya, dengan penuh hormat Istana Kekaisaran di Tokyo, menghormati bendera dan melaksanakan *Taso*. Jepang mengakui nilai Pendidikan dan melaluinya menciptakan individu-individu yang berkualitas, khususnya generasi muda sebagaimana yang dimaksud oleh Jepang.

Tahun	Nama	Tempat Didirikan
1942	Sekolah Menengah Pertama (<i>Shoto Chu Gakko</i>)	Delitua, Jln. Taruna APDN No.13, Medan
1944	Sekolah Menengah Tinggi (<i>Koto Chu Gakko</i>)	Komplek perkuburan Jepang, di Jl. Binjai. Sebelum dipindahkan ke Delitua Jl. NOGIO VI NO.117, Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

1942-1945	Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (<i>Rigukun Shikan Gakko</i>)	Terletak di Gang Famili, Lorong Idris, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
-----------	--	--

Berdasarkan Tabel di atas ada Empat Sekolah yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintahan Jepang di kota Medan di tahun 1942 dengan nama sekolah Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko) yang berada di Simpang Limun. Di tahun 1942 Sekolah Menengah Pertama (Shoko Chu Gakko) yang berada di Simpang Limun. Di tahun 1944 Sekolah Menengah Tinggi (Koto Chu Gakko) yang berada di Komplek perkuburan Jepang, di JL. Binjai. Sebelum di pindahkan ke Delitua JL. Gatot Subroto. Di tahun 1942- 1945 Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (*Rigukun Shikan Gakko*) yang terletak di Gang Famili, Lorong Idris, Kel.Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

Fenomena ini menjadi alasan ketertarikan penulis untuk mengkaji mengenai Analisis Sistem Pendidikan di bawah Pemerintahan Jepang di Kota Medan (1942- 1945) karena kajian ini sangat penting sebagai faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan masyarakat kota Medan. Serta kajian ini juga memberikan bukti- bukti peninggalan sehingga memperkuat argumentasi terkait Sekolah Rakyat dan Pendidikan Militer yang ada di kota Medan.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini dianggap sebagai studi kualitatif yang mengambil pendekatan sejarah. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi beberapa antara lain heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (pengujian data), interpretasi (pembentukan teori) dan historiografi (penulisan sejarah).

Langkah pertama adalah heuristik, yaitu tahap pertama dari kegiatan pengumpulan data sejarah, baik primer maupun sekunder. Sumber sejarah adalah bahan tertulis yang mengandung informasi sejarah melalui studi literatur. Penelitian terkait literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu dalam menangani topik penyelidikan saat ini. Yang dilakukan adalah mengumpulkan data primer berupa dokumen, foto, arsip, wawancara tentang Analisis Sistem Pendidikan di Kota Medan. Selain itu, sumber sekunder dapat diakses dari buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan topik Analisis Sistem Pendidikan di Kota Medan. Sumber-sumber ini akan melengkapi informasi dari sumber-sumber sekunder.

Langkah kedua adalah mengkritisi sumber dalam bidang penelitian, hal ini disebut pengelolaan dan analisis data. Kritik sumber dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua tingkat manajemen data: kritik eksternal atau kritik internal. Langkah kritik eksternal adalah memverifikasi keaslian sumber dalam dokumen dan kemudian mengubahnya agar sesuai dengan topik. Proses kritik internal adalah penyelidikan kebenaran dengan menguji dokumen, menguji keaslian informasi dengan melakukan penelitian terhadap informasi yang dikaitkan dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi.

Ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menghubungkan informasi yang sama dan memaknainya. Proses ini difasilitasi oleh sumber data yang telah diverifikasi keakuratannya kemudian dianalisis, sumber tersebut kemudian digabungkan dengan sumber yang berasal dari landasan teori yang telah penulis uraikan sebelumnya. Akibatnya, informasi baru dapat ditemukan, kesimpulan analisis didasarkan pada batasan masalah dan rumusan masalah.

Keempat historiografi, historiografi adalah metode penulisan, penyajian, atau pelaporan hasil penelitian sejarah. Ini merupakan metode penelitian sejarah yang terakhir, penulisan hasil penelitian dituangkan dalam sebuah artikel tertulis. Historiografi adalah upaya untuk menuliskan peristiwa dalam urutan kronologis, urutan logis dan sistematis dengan menjelaskan fakta sejarah untuk membuat narasi ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Latar belakang masuknya Jepang ke kota medan

Pada tahun 1942, pasukan Jepang yang menyerbu wilayah Sumatra adalah prajurit 25 yang bermarkas di Shonanto, tepatnya mereka mendarat sekitar pukul 23.00 pada tanggal 12 Maret 1942. Prajurit tersebut termasuk Divisi Pengawal Istana ke-2 serta divisi ke-18 yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Nishimura. Adalah Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram yang menyerbu kota medan, mereka mengendarai sepeda yang dari penduduk setempat untuk ditukar dengan barang. Mereka memiliki janji bahwa mereka memberikan bantuan kepada orang Asia karena mereka adalah saudara Tuo, akibatnya mereka menyambut baik kedatangannya.

Pada masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di kota Medan tidak teratur, masyarakat memanfaatkannya untuk membalaskan dendam Belanda. Hal ini segera diakui oleh militer Jepang melalui pengerahan pasukan yaitu Kempetai (polisi militer Jepang). Dengan kedatangan Jepang di kota medan, keadaan langsung berubah khususnya pemerintahan sipil, yang pada masa Belanda disebut gemeentebestuur oleh Jepang, yang kemudian menjadi Medan sico (pemerintahan kota Praja).

Orang di dalam jabatan publik di wilayah kotamadya kota medan sejak saat sampai akhir pemerintahan Jepang disebut Hoyasahi. Kekuasaan Jepang di kota Medan semakin meluas, bahkan semakin melumpuhkan rakyat, karena dalam kondisi seperti ini mereka lebih dengan mudah menguasai seluruh nusantara, semboyan abang hanya semboyan. Di sebelah timur kota Medan yaitu Marindal, Kengrohositai kini telah dibangun semacam perkebunan negara. Di kawasan Titi Kuning Medan, Johor, dekat Lapangan Polonia, kini mereka sedang membangun lapangan terbang untuk jet tempur Jepang.



Gambar 1.1 Masuknya Jepang ke kota Medan



Gambar 1.2 Penjajahan Jepang

Perkembangan pendidikan masa pendudukan Jepang di kota Medan

Kepentingan penjajah dalam konteks pendidikan atau melakukan dan memberikan pendidikan kepada pribumi hanyalah bentuk identitas kekuasaan terhadap bangsa yang dijajah dan menguatkan potensinya dalam perang dunia, seperti yang dilakukan pendidikan masa pendudukan

Jepang terdapat transformasi adat, tradisi, sikap, dan mental penjajahan Jepang terhadap bangsa Indonesia, seperti sikap berani, semangat kemajuan, dan filsafat kekuatan Asia Raya. Pendidikan yang diterapkan di masa pemerintahan Jepang adalah pendidikan paramiliter dengan melakukan latihan jasmani kepada siswa, latihan kemiliteran, dan pengajaran yang ketat. Meskipun demikian, penduduk Kota Medan memiliki banyak peluang di bidang pendidikan.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah militer Jepang di kota Medan sangat berbeda dengan pendidikan yang ditawarkan pada zaman Belanda, karena semua lapisan masyarakat pribumi dapat mengaksesnya. Namun pada dasarnya pendidikan bahasa Jepang bagi masyarakat kota Medan hanya dijadikan sebagai propaganda di balik layar, karena setelah kebijakan tersebut diterapkan justru berujung pada jumlah siswa, kehadiran sekolah menurun dan jumlah sekolah juga berkurang sangat drastis.

Sekolah juga dibuka karena semakin bertambah orang yang berbudi luhur, namun juga hal yang mendesak untuk merekrut perwira kecil di perkebunan. Pada tahun 1942, pemerintahan Belanda di Sumatra timur juga berakhir. Sekolah yang menggunakan bahasa Belanda seperti *volkschool*, *vervoegschool*, *H.I.S.*, *E.L.S.*, *Standard School* sebagai bahasa pengantar diganti dengan sekolah dalam sistem pendidikan Jepang. Sistem pendidikan di bawah pemerintahan Jepang memiliki persamaan dengan sistem pendidikan yang saat ini. Sekolah Dasar di bawah pemerintahan Jepang disebut (*Kokumin Gakko*) sedangkan pada zaman Belanda Sekolah Dasar disebut *volkschools*. Sekolah ini dibuka untuk seluruh golongan masyarakat dengan masa sekolah 6 tahun. Lalu melanjut ke (*Shoto Chu Gakko*) yang pendidikan dilakukan selama 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Sekolah menengah kejuruan (*Kogyo Gakko*) dan (*Kogyo Semmon Gakko*). Jika digambarkan secara grafis, sistem sekolah di Jepang tidak berbeda dengan sistem sekolah setelah kemerdekaan. Yang diajarkan ialah dalam Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan Bahasa Jepang, serta senam jalan. Pendidikan menengah yang dilakukan oleh Jepang sangat singkat karena saat itu Jepang menyerah kepada sekutunya, perguruan tinggi ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dan berganti nama menjadi Sekolah Rakyat. Sekolah Populer Akademik ini terjadi dalam suasana perang kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan tidak berdasarkan sistem kelas kebangsaan atau status sosial. Pendidikan paling bawah di Indonesia adalah sekolah dasar pada tahun 1945 sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Rakyat (SR) dengan masa mengajar 6 tahun. Pendidikan menengah dibagi menjadi dua jenjang, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SLTA) setiap level berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah Rakyat adalah lembaga Pendidikan tingkat dasar yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942. Pendidikan sekolah dasar ini diselenggarakan dalam rangka membentuk jiwa kejepangan serta membentuk generasi muda Indonesia yang akan diharapkan dapat membantu pemerintah Jepang selama Perang Besar Timur mencapai kemenangan/kemakmuran di Asia Timur Raya. Pendidikan dasar terbuka di Indonesia di bawah kendali Jepang. Pendidikan Dasar merupakan bidang yang banyak digunakan oleh pemerintah militer Jepang sebagai sarana mendidik masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 12 di tanggal 22 April 1942, sekolah tidak boleh dibuka di masa pemerintahan Belanda pada masa pemerintahan Jepang. Sekolah dasar di zaman pemerintahan Belanda seperti *Volksschule* (sekolah desa), *Second Grade Schools* *Complete Domestic Schools* (*Wolledge Tweed Klas School*), *Dutch Inlands School* (*HIS*), *Schakelschool* pada pemerintahan Jepang semuanya berganti menjadi *Volksschulen*. Konsolidasi pendidikan (menggabungkan sekolah yang berbeda tetapi pada tingkat pendidikan sekolah yang

sama oleh pemerintah Jepang telah menunjukkan bahwa perbedaan dalam sistem pendidikan sudah menghilang. Dalam Osamu Seirei No. 10, Bagian VIII “Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Sekolah Rakyat”, dijelaskan: sekolah rakyat adalah sekolah yang berada di naungan Syuutoka (residen/gubernur) Tokubetu Sityoo (walikota khusus) dan Sityoo (walikota), Gaku-Ku (badan hukum di bidang pendidikan di masing-masing wilayah didirikan oleh Kentyoo yang diurus dan diawasi oleh Sontyoo, Gaku-ku telah mengangkat sejumlah karyawan atas izin Kentyoo, badan hukum ini didirikan untuk tujuan mengawasi dan memeriksa sekolah swasta yang dijalankan oleh Son atau beberapa Gaku-ku di dalam Son, tidak termasuk wilayah Kooti) dan guru Staf sekolah juga bertanggung jawab atas administrasi sekolah.

Untuk mengelola dan mengawasi sekolah umum, Gaku-Ku mengadakan Gaku-Ku Linkai (rapat dewan Gaku-Ku) dan menunjuk Lin (wali) yang dipimpin oleh Kutyoo, Kokumin Gakkootyoo, dan Sontyoo yang terlibat dalam Gaku-Ku yang ditunjuk. Di Si juga ada Kyooiku Sinkoo Linkai (organisasi yang meningkatkan pendidikan), yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah pendidikan yang terjadi di daerah yang dikelola Si dan memimpin upaya untuk mengarah pada kemajuan pendidikan rakyat. Penjelasan ini menguraikan bagaimana pendidikan sekolah negeri diawasi dan dikelola di setiap wilayah di bawah si (pemerintah kota), tidak hanya guru sekolah yang bertanggung jawab atas administrasi, juga mereka yang tidak terpisah dari pengawasan pemerintah di tingkat Syuu (kediaman.) di Ku (desa) (Tjahaja, 9 Sigatu 2605/1945 lulus).

Aturan tentang pembukaan kembali sekolah (sekolah rakyat) di tanggal 29 April 1942 dibagi atas dua kategori, yaitu Syotoo Kokumin Gakko (sekolah pertama) setara dengan volks atau sekolah di desa yang di bawah pemerintahan Belanda, masa pendidikannya adalah tiga tahun. Kokumi Gakko (sekolah swasta), sama dengan Vervolg school (sekolah menengah atas), sekolah kelas volllige twee-de (sekolah serba pribumi) di bawah pemerintah Belanda, masa pendidikan 6 tahun. Setelah diterbitkannya pasal 46 sampai 49 Bagian X Osamu Seirei No. 10, jenjang Pendidikan atau komposisi Sekolah Dasar, ada dua jenis, sekolah pertama atau Syotoo Kokumin Gakko dan SMA Kokumin Gakko dianggap sebagai Sekolah populer dengan dua jenis (Tjahaja, 7 Sigatu 2605/1945 kolom 5), antara lain: jenis pertama Sekolah populer yaitu Syootoka. Kemudian di jenjang SMA yaitu Syootoka (bagian satu) yaitu jenjang SMP atau sederajat SD pada pendidikan saat ini yaitu dari kelas satu sampai dengan kelas tiga, Syootok hadir dalam melanjutkan belajar di SMA pada bagian kedua. SMA bagian kedua yaitu Kootooka (jenis kedua), setelah menyelesaikan pendidikan Anda di SMA bagian pertama atau Syootoka Anda bisa melanjutkan ke SMA bagian kedua atau Kootooka. Kootooka adalah SMA di Syootoka, khususnya kelas 4 sampai 6. Kesempatan belajar terbuka untuk masyarakat pribumi tanpa membedakan kehidupan sosial dalam sekolah dan oleh biaya pendidikan yang sangat murah daripada biaya Pendidikan pemerintah Belanda telah menyebabkan peningkatan bertambahnya siswa, hal lain yang dapat mempengaruhi adalah insentif pemerintah. Sadar akan keadaan pemerintahan yang baru di bawah tekanan kuat dari para pemimpin desa, sehingga pasti akan banyak orang tua yang akan menyekolahkan anak anak mereka.

Di dalam peraturan Osamu Seirei No. 10 tahun 2605/1944 Bagian VII “Mengenai Perlengkapan Sekolah” pasal 24-26 (Tjahaja, 9 Shigatsu 2605/1945, kol 1), didirikan atau mendirikan Sekolah umum untuk memenuhi kebutuhan penunjang untuk kegiatan pembelajaran seperti halaman sekolah, perlengkapan sekolah, lapangan olah raga. Semua perangkat ini digunakan untuk kegiatan yang berbeda: Pelatihan militer, pendidikan kewarganegaraan, perlindungan wilayah, penjagaan, perdagangan produk, dan kegiatan medis atau bahkan amal.

Landasan Pendidikan yang ada pada masa pemerintahan Jepang adalah Hakko Iciu (Persemakmuran di Asia Timur Raya). Dalam Pendidikan umum, khususnya di tingkat sekolah dasar atau sekolah negeri, pemerintah Jepang sudah merumuskan tujuan pendidikan yang harus sejalan dengan Hakko Iciu. Kaidah untuk keperluan pendidikan Sekolah Negeri tertuang dalam Osamu Seirei No. 10 Bagian 1 Pasal 1 yaitu, Kokimin Gakko atau (Sekolah Rakyat) diselenggarakan dengan Maksud untuk yang mengajarkan ilmu dan pengetahuan umum, berdasarkan gagasan lingkungan Asia Timur Raja dan pelatihan dasar agar manusia menjadi bangsa baru yang akan berkembang di masa depan.

Pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Jepang tidak lepas dari keinginan dalam mengembangkan tenaga kerja dan militer. Sebagian besar pelajaran akan melatih siswa dengan jiwa dan semangat Jepang (Nippon Seishin) termasuk samurai, khususnya dalam melayani pemerintah (pemimpin) Jepang dan orang tua mereka. Siswa sekolah umum adalah anak-anak berusia 6 tahun atau lebih. Pendaftaran siswa sekolah negeri dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: calon siswa harus mendaftar terlebih dahulu untuk bersekolah lalu calon siswa akan ditanya data diri dari data yang sudah dilengkapi maka akan resmi terdaftar sebagai mahasiswa. Namun berbeda dengan sekolah Pasekan, karena anak di desa Pasekan cenderung tidak sekolah, karena pendaftaran calon siswa sekolah umum dilakukan oleh kepala desa/bekel (merujuk kepada kepala desa). Ku atau Pemkab), termasuk mengunjungi rumah anak usia sekolah (kurang lebih 6 tahun) dengan maksud untuk menyuruh anak tersebut bersekolah (Wawancara Djaman, 2 April 2014). Di bawah tekanan pemerintah desa, anak yang ada di desa melakukan semua dikatakan kepala desa, yaitu pergi ke sekolah. Sebagian siswa tersebut tinggal di desa sekitar sekolah rakyat yang didirikan tersebut. Perkembangan pendidikan yang terjadi pada masa lalu dan didirikan oleh pemerintah Jepang di kota Medan, menjadikannya tokoh sentral dalam pergerakan internasional keluarga Indonesia.

Pendidikan pada dasarnya membangun peradaban bangsa melalui Pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah suatu bangsa juga dapat dilihat dari pendidikan suatu bangsa. Demikian pula Kota Medan memiliki Sejarah perkembangan pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman, pendidikan terus berkembang secara dinamis. Pendidikan kolonial tidak menitik beratkan pada pendidikan kemanusiaan seperti halnya pendidikan, tetapi hanya ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan politik dan ekonomi sepihak, seperti yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda.

Keinginannya untuk mempopulerkan dan mengajarkan bahasanya secara luas kepada masyarakat Jepang diwujudkan, terutama dengan dijadikannya bahasa Jepang sebagai pelajaran yang diwajibkan di pendidikan umum. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami apa saja atau segala sesuatu tentang Jepang (kehidupan, semangat, dan budaya Jepang). Pelajaran Bahasa Jepang akan diajarkan kepada siswa sekolah umum dari kelas tiga hingga lebih tinggi.

Selain itu pelajaran yang akan diajarkan adalah berhitung, menulis, kerja kasar, gerak badan (taiso), seni vokal/bernyanyi, olah raga, menggambar, tata krama, sejarah, geografi, kebersihan dan kesehatan, tubuh manusia, ilmu pengetahuan alam, bahasa Nippon/Jepang, Melayu dan berjalan. Program yang digunakan hanya membaca, menulis dan berhitung, hanya dalam bentuk pengetahuan yang paling dasar dan sederhana.

Dalam melaksanakan pembangunan negara pasca kemerdekaan di segala bidang perlu adanya landasan berupa kebijaksanaan. Untuk mewujudkannya, pemerintah kemudian

membangun gedung sekolah dan menambah tenaga pengajar dalam bentuk arahan presiden dan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini karena gedung dan tenaga pengajar merupakan sumber utama penyelenggaraan pendidikan nasional, maka kota medan sebagai pusat pendidikan Sumatra Utara dalam rangka memajukan Pendidikan telah berupaya memperbanyak gedung sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, meskipun tuntutan ini sangat jauh dari apa yang akan diharapkan, namun manfaatnya mulai dirasakan oleh warga kota dan sekitarnya. Di tahun 1970 jumlah sekolah masih sangat terbatas, sementara jumlah anak usia sekolah semakin bertambah. Sekolah negeri tidak sebanyak sekarang, banyak bermunculan lembaga pendidikan di negeri ini, terutama di kota-kota besar.

Di bawah kekuasaan Jepang, guru merupakan pendidik yang harus memiliki dakwah karena memiliki kemampuan berbicara yang benar. Salah satu sarana dakwah di lingkungan sekolah adalah bernyanyi. Sebelumnya, pemerintah Jepang menyelenggarakan pelatihan bagi guru perwakilan Ken (kabupaten) dan Si (kotamadya) se-kota Medan sebagai bentuk indoktrinasi. Untuk menanamkan ideologi persemakmuran di Asia Timur Raya/Hakko Iciu. Konsep Hakko Iciu penting untuk diajarkan kepada Guru, karena Guru merupakan pendidik yang akan membimbing siswanya menuju cita-cita yang diinginkan. Penerbitan buku pelajaran oleh dinas pendidikan berada di bawah pengawasan pemerintah pusat militer atau Gunseikanbu karena buku Gunseikanbu yang digunakan sebagai buku pelajaran resmi pada saat itu, yang dimaksudkan untuk menyediakan buku pelajaran sebagai penunjang kegiatan sekolah dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang.

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMA dimulai pukul 07.00 sampai selesai 13.00. Kegiatan pembelajaran diawali dengan upacara harian yaitu mengibarkan bendera Kokki atau bendera nasional Jepang. Bendera Kokki dikibarkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dalam rangkaian upacara, para siswa kemudian mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, yang berbunyi: *Warera wa Sin Jawa no Gakko to nari (kulo sedoyo new dados / siswa SMA Jawa kami) semua menjadi siswa Jawa baru), Dai Toa sensoo ni manabi (kulo sedoyo sinau kagum menang utawi jaya/kami belajar untuk kemenangan atau kemuliaan optik (Greater Asia of the 'est)* kemudian akan dilanjut olah raga atau taiso.

Jam masuk sekolah diawali dengan cara guru mengabsen terlebih dahulu. Selanjutnya guru menyuruh siswa duduk tegak dan memerintahkan seluruh kelas untuk diam, guru menutup mata dan siswa diam sejenak sambil mengucapkan kalimat bahasa Jepang secara bersama-sama. (Wawancara dengan Kadinem, 22 Januari 2014 dan wawancara dengan Djaman, 4 Februari 2014). Kewajiban yang tidak bisa dipikul oleh pemerintah Jepang kepada siswa ialah penanaman, memelihara dan memanen pohon wijen. Menurut Kadinem sebagai bagian dari pembelajaran penanaman pohon wijen merupakan kewajiban bagi setiap para siswa sehingga siswa yang berada di Sekolah negeri harus memanen bibit jarak pagar yang ditempatkan di pinggir jalan dan di sekitar lokasi sekolah di bawah pengawasan seorang guru. Pada akhir tahun ajaran, siswa sekolah umum menerima rapor atau hasil akademik untuk tahun kehadiran (semua tahun 1, 2 dan 3) yang mencakup nilai akademik (ilmiah/keterampilan). Wawancara dengan Sukesi, 25 Januari 2014 dan wawancara dengan Djaman, 2 April 2014). Menjelang akhir populasi, minat terhadap Pendidikan harus berhenti karena tekanan ekonomi dan siswa mulai putus sekolah situasi yang semakin sulit memaksa para siswa untuk pergi ke ladang membantu orang tua mereka bertani, dan mengorbankan studi mereka untuk membantu orang tua mereka membiayai kehidupan mereka yang sibuk. dengan Jepang (Wawancara dengan Karmi, 2 Mei 2014). Setelah pemerintahan Jepang di kota medan berakhir, lambat laun sekolah sekolah yang pernah didirikan oleh pemerintah

Jepang kini sudah ditutup. Banyak para orang tua tidak mau lagi menyekolahkan anaknya, begitu pun para anak anak lebih memilih untuk membantu orang tuanya.

Namun seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa anak yang merindukan masa masa sekolah tersebut. Dengan kemauan para anak maka para orang tua dan raja ni huta (penatua kampung) atau saat ini disebut kepala dusun mulai membangun sekolah dengan peralatan seadanya. Meskipun sekolah yang mereka tidak layak untuk di tempati, namun rasa semangat untuk belajar yang para anak anak miliki membuat sekolah tesebut bangkit kembali. Saat itu mereka tetap belajar tentang apa yang diajarkan oleh pemerintahan Jepang, tapi ada sebagian tidak mereka pelajari seperti mengganti pelajari bahasa Jepang menjadi bahasa daerah serta tidak lagi menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan menggantinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara.

Saat ini Sekolah Rakyat yang didirikan di daerah Simpang Limun tepatnya di Kec. Gebang oleh pemerintahan Jepang sudah diganti menjadi Sekolah Dasar. Sekolah ini resmi berdiri pada tahun 1978 dengan jumlah guru sebanyak 9 orang serta jumlah murid sebanyak 89 orang diantaranya 42 siswa laki laki dan 37 orang siswa perempuan. Sekolah ini memiliki ruang belajar (rombel) sebanyak 6 ruang, dan saat ini sekolah yang biasa disebut SD ini masih menggunakan kurikulum 2013 serta sekolah ini dilaksanakan pada pagi hari selama 6 hari (senin-sabtu) berturut turut. Kemudian Sekolah Menengah Pertama yang pernah didirikan oleh pemerintahan Jepang di kota Medan saat ini sudah diganti dan bangunannya sudah dirobohkan serta di bentuk kembali dengan bangunan yang layak. Sekolah peninggalan pemerintahan Jepang ini berada di Delitua Jln. Taruna APDN No.13, Medan yang sekarang ini disebut SMP NEGERI 1 DELITUA. Sekolah ini memiliki jumlah guru sebanyak 35 orang tenaga pendidik dengan jumlah murid sebanyak 487 orang siswa yang diantaranya 213 siswa laki laki laki laki dan 274 siswa perempuan. Sekolah ini juga mempunyai 32 ruangan kelas, 2 perpustakaan serta 2 ruang laboratorium. Sekolah ini memiliki mata Pelajaran seperti sekolah lain pada umumnya juga masih menggunakan kurikulum 2013, sekolah ini dilaksanakan selama 6 hari (senin-sabtu) secara berturut turut di pagi hari sampai di jam 2 siang seperti sekolah pada umumnya. Peninggalan sekolah di masa pemerintah Jepang selanjutnya adalah Sekolah Menengah Tinggi yang saat ini sudah diganti menjadi SMAS RK DELIMURNI DELI TUA yang berada di Komplek perkuburan Jepang, di Jl. Binjai. Sebelum dipindahkan ke Deli tua Jl. Nogio VI No.117 Deli Tua Timur Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang. Sekolah ini sudah berdiri sejak 08 agustus 1977 kurang lebih sudah 45 tahun dengan tenaga pengajar sebanyak 22 orang guru dengan 187 orang siswa laki laki dan 216 siswa Perempuan sehingga jumlah keseluruhan mencapai 403 orang siswa kemudian dilengkapi dengan ruang kelas sebanyak 15 ruang, memiliki ruang perpustakaan sebanyak 2 ruang dan 2 ruang laboratorium. Sekolah ini dilaksanakan di pagi hari sampai dengan di jam 3 sore yang biasanya di lakukan selama 6 hari (senin-sabtu) secara berturut turut.

Namun diantara tokoh Pendidikan yang ada di medan, Sumatra Utara ada seorang perempuan yang berjuang memajukan pendidikan bangsa Indonesia yaitu Ani Idrus, seorang jurnalis kawakan yang lahir di persawahan dari Lunto, Sumatra Barat, selain di dunia jurnalistik, ia juga mendirikan dan menjalankan sebuah Lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Ani Idrus. Sebelum kematiannya, ia memegang berbagai posisi di beberapa organisasi. Ani Idrus merupakan sosok yang berperan dalam pembangunan pendidikan Indonesia khususnya di kota Medan, terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga pendidikan (sekolah) yang dipimpin oleh kepala pendekar pendidikan ini. Ani Idrus berjuang di beberapa bidang pada tahun 1936, ia memperoleh reputasi yang sangat baik di kalangan pers. Bekerja di harian "Sinar Deli" di Medan,

ia juga menerbitkan majalah politik “Seruan Kita” bersama Haji Mohammad Said yang juga menjadi suaminya. Pada tanggal 11 Januari 1947, mereka menerbitkan: "Pewarta Deli" "Majalah Wanita" dan "Harian Waspada". Pada tahun 1969, Ani Idrus mengoperasikan empat jenis surat kabar cetak, yaitu: Harian Siaga, Majalah Dunia Wanita, Koran Masuk Desa (KMD) dan Koran MasuknSekolah (KMS). Pada tahun 1955, ia mendapat kesempatan untuk melaporkan perundingan antara Tengku i Abdul Rahman dan Chin Peng (pemimpin Komunis Melayu) di Baling, Malaysia. Pada tahun 1974, ia dan rombongan Adam Malik menghadiri KTT Negara-Negara NonBlok di SriLanka.

Pada tahun 1991, saat diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, ia diminta berbicara tentang "Kebudayaan dan Perempuan". Pada tahun yang sama, ia menerima Penghargaan Menteri Negara Peran Perempuan (Meneg UPW) terkait Harian Waspada sebagai surat kabar terbaik dengan konten yang mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Berbagai kegiatan ia lakukan seolah tak pernah bosan, semakin ia menekuni pengalaman baru semakin giat ia bekerja. Ia saat itu mendirikan “Taman Indria” yang terdiri dari puskesmas day tupai, taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Medan. Taman Indria sedang dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Komunikasi Pembangunan.

Pada tahun 1978 sebagai bagian dari Hari Kartini, Ani Idrus mendirikan Perguruan Tinggi ERIA yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja 195 Medan. Pada tahun 1984 membuka sekolah pendidikan agama Islam tingkat dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah “Rohamah” yang terletak di Jalan Selamatan Ujung, Simpang Limun, Medan. Selain pendidikan, Ani Idrus juga sangat tertarik dengan politik. Pada tahun 1937, beliau menjabat sebagai anggota "Gerakan Indonesia" (Gerindo) di Medan, sebelum itu pada tahun 1934 beliau menjabat sebagai wakil presiden organisasi "Indonesia Muda" dalam gerakan perjuangan pemuda. Pada tahun 1949, ia menjadi anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) dan beberapa kali menjadi ketua penerangan dan anggota rapat pleno pusat PNI di Jakarta. Pada tahun 1950, ia mendirikan "Front Perempuan Sumatera Utara", menjabat sebagai presidennya. Dari tahun 1960 hingga 1967, Ani Idrus menjadi provinsi DPRGR Tk I dari girl grup di Sumatera Utara. Tahun 1967 - 1970 menjadi anggota kelompok kerja DPRGR Tk I Sumatera Utara (jurnalis). Pada tahun 1992, ia menjadi salah satu calon wakil daerah MPR.



Gambar 1.3 SDN No. 054943 SIMPANG LIMUN



Gambar 1.4 SMPN 1 DELITUA



Gambar 1.5 SMAS RK DELI MURNI DELITUA

Kesimpulan

Pemerintah Jepang telah merombak Sistem Pendidikan yang menerapkan kebijakan baru dan sejalan dengan tujuan propaganda Jepang di kota Medan. Diskriminasi dan dualisme dalam Pendidikan akan dihilangkan. Sistem pelatihan dan Pendidikan Sekolah baru tersebut telah membuat semangat belajar yang besar di kalangan anak kota Medan. Sistem Pendidikan yang dilaksanakan di zaman pemerintahan Jepang dirancang sebagai penerapan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tujuan Pendidikan yang ingin di buat di sekolah umum adalah untuk mewujudkan Hakko Iciu, yaitu pendidikan sains berdasarkan cita-cita yang muncul di lingkungan Asia Timur Raya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masa pendudukan Jepang pun kondisi pendidikan pada masa itu sangat buruk jika dibandingkan dengan akhir pemerintahan Jepang di Hindia Belanda. Namun setidaknya telah ada beberapa kebijakan yang benar-benar menguntungkan bangsa Indonesia, bahkan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia, kebijakan ini adalah kebijakan pembuatan bahasa, masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Banyak buku berbahasa asing telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan bahasanya yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Referensi

- Ekajati, E.S. dkk. (1998). Sejarah Pendidikan Daerah kota Medan. Medan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hapsari, Ratna, M. adil. (2012). Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok Wajib. Jakarta, Indonesia. Erlangga.
- Koentjaraningrat. (2009) Pengantar Ilmu Antropologi. Jogjakarta. Yayasan Benteng Budaya.
- Rineka Cipta.Permadi, E. G., & Purwaningsih, S. M. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol 3. No.3, 590–603.
- Sofianto, K. (2014). Medan Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945) Sosiohumaniora, Vol16.No.1. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.564>
- Wirananggapati, Suganda, dkk. (1992). Sejarah Nasional dan Dunia 2. Galaxy Puspa Mega. Vol.7 No.2 September 2020 [75-80].